



***RELEASE***  
**KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI  
KE SULAWESI UTARA**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023 - 2024  
TANGGAL 15-19 JULI 2024**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas program kinerja mitra Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 melaksanakan kunjungan kerja pada saat masa reses di Sulawesi Utara. Kunjungan Kerja ini di pimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, dan di damping Wakil Ketua Bpk Dr. TB. Ace Hasan S beserta anggota tim kunjungan kerja.

Profil singkat Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten dan 4 kota yaitu: Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon. Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten BolaangMongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara. Adapun luas Wilayah Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 sebesar 13.851,64 km<sup>2</sup>.

Pada saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR dilakukan pengawasan distribusi bantuan sosial sebesar Rp297.342.060.928 bertempat di sentra Tumou Tou bersama direktur Dayasos Kementerian Sosial RI berupa Bansos PKH senilai Rp.114.936.820.616, Bufferstok penanggulangan bencana senilai Rp1.953.065.000, bantuan antensi pemenuhan kebutuhan hidup layak sentra Rp2.825.430.312. bantuan kewirausahaan Rp.122.584.500. bantuan atensi dukungan disabilitas Rp306.560.500 dan Dayasos tahap 1-4 (Januari-Juni) Rp177.198.200.000. kemudian DAK non fisik dana perlindungan Perempuan dan anak tahun 2024 untuk provinsi Sulawesi Utara dan 12 Kab/Kota sebesar Rp.6.076.000.000,- dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kesimpulan dan rekomendasi hasil kunjungan kerja pada masa reses sebagai berikut:

1. Peningkatan status IAIN Manado menjadi Universitas Islam Negeri diperlukan langkah komperhenship dan kesiapan sarana prasarana serta sumber daya manusia dan juga survei kebutuhan masyarakat, sehingga rencana peningkatan status memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan perkembangan kampus dan dapat menghasilkan.
2. Revitalisasi asrama haji sulawesi utara, kondisi bangunan asrama haji sudah dibangun sejak 1980 an dan baru ada satu lokal yang baru di revitalisasi, sebagai asrama haji antara, jemaah haji asal sulawesi utara diberangkatkan dari embrakasi di kalimantan selatan, sebelumnya para jemaah haji asal sulawesi utara dan gorontalo di inapkan terlebih dahulu di asrama haji antara, karena kondisi bangunan yang sudah lama dan penampungan jemaah haji kerapkali over kapasitas, maka kebutuhan revitalisasi asrama haji menjadi urgent dan juga peningkatan status menjadi embrakasi asrama haji karena di dukung oleh status internasional bandara sam ratulangi sulawesi utara.
3. Perlindungan Perempuan dan anak di Sulawesi utara tertangani secara baik, namun ada keterbatasan penampungan terhadap korban kekerasan, karena itu berharap ada bantuan DAK fisik bagi perlindungan Perempuan dan anak di Sulawesi Utara
4. Peningkatan status sentra Tumou Tuo menjadi setara Balai kesejahteraan sosial sehingga dapat menampung penanganan masalah sosial yang tersebar di Sulawesi Utara dan sekitarnya, hal ini peting mengingat letak geografis dan usgensi penanganan yang cepat dan menyeluruh atas masalah-masalah kesejahteraan sosial di Sulawesi utara dapat segera terlindungi dan tertangani secara komperhenship.
5. Meningkatkan peran pemerintah provinsi sulawesi utara dan ini tercermin dari program dan alokasi anggaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, kerukunan umat beragama, pemberdayaan kelompok rentan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pada setiap Kabupaten/Kota telah disiapkan lumbung kesiapsiagaan bencana dengan pemetaan sesuai dengan karakteristik potensi bencana yang kemungkinan terjadi di setiap wilayahnya.

Demikian hasil kunjungan kerja reses ini disimpulkan dan direkomendasikan.

Jakarta, 19 Juli 2024

Ketua Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Manado Provinsi Sulawesi Utara